



DOKUMEN
RENCANA KERJA TAHUN 2024
(RENJA-2024)



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJENE
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan mekanisme penyusunan dan Sistematika sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disamping itu juga memperhatikan kesesuaian sebagaimana yang diatur dalam Kepermendagri Nomor 050-0378 Tahun 2020, sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2024, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah serta Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Majene Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2024.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Disamping itu, dengan Terbitnya Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Kepermendagri Nomor 050-0378 Tahun 2020 maka membuat Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene Tahun 2024 harus mengalami Penyesuaian pada Nomenklatur Kegiatan baik pada tingkat Program, Kegiatan dan juga Sub Kegiatan. Namun untuk Evaluasi Dokumen Renja pada Tahun sebelumnya tetap akan dilakukan sebab esensi dari maksud pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Permendagri ini tetap dapat disesuaikan dengan Program dan Kegiatan pada Tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 semoga dapat terealisasi dengan seefekif dan seefisien mungkin untuk kemudian diimplementasikan sebaik-baiknya dalam upaya untuk mendorong Pembangunan di Daerah Kabupaten Majene.

Majene, 29 Mei 2023

KEPALA DINAS

KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN MAJENE



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum.....
1.3. Maksud dan Tujuan.....
1.4. Sistematika Penulisan.....

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023.....

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan
Capaian Renstra OPD Tahun 2021-2026
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
OPD
2.4. Review terhadap Prioritas Daerah dalam Rancangan
Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari
Masyarakat.....

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....
3.2. Program dan Kegiatan.....

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan/2023, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Bab IV pasal 27 ayat (1), maka penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene Tahun 2021 - 2026, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene.

Disamping itu, dengan Terbitnya Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepermendagri Nomor 050-0378 Tahun 2020, maka

membuat Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene Tahun 2024 harus mengalami Penyesuaian pada Nomenklatur Kegiatan baik untuk pada tingkat Program, Kegiatan dan juga Sub Kegiatan. Namun untuk Evaluasi Dokumen Renja pada Tahun sebelumnya tetap akan dilakukan sebab esensi dari maksud pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Permendagri ini tetap dapat disesuaikan dengan Program dan Kegiatan pada Tahun sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Kepermendagri Nomor 050-0378 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 Tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024.

- 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Prioritas Daerah dalam Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...

BAB V. PENUTUP.....

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD 2021-2026

Pada Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, seperti tergambar sebagaimana tabel lampiran 1.

Berdasarkan Pada tabel tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene memiliki sebanyak 16 program, 24 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan yang secara rinci digambarkan pada Lampiran Tabel 1 dibawah.

Seperti terlihat pada Lampiran Tabel 1 dibawah, dapat dijelaskan bahwa Realisasi untuk Program dan kegiatan kaitannya dengan Rencana yang ditargetkan, secara umum hanya dapat terealisasi dikisaran sebesar 56,25 % (9 Program dari 16 Program) untuk Level Program dan 66,66 % (16 Kegiatan dari 24 Kegiatan) untuk Level Kegiatan di Tahun 2022, sehingga terdapat 7 Program dan 8 Kegiatan yang tidak dapat terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, dimana salah satu yang menjadi penyebab utamanya adalah Pagu Anggaran yang dialokasikan yang masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, sehingga secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian target realisasi kinerja secara keseluruhan terkhusus terhadap Binaan yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene, yang belum dapat tersentuh secara menyeluruh, massif dan berkesinambungan dikarenakan ketidakcukupan Sumber Daya yang dimiliki, disamping itu juga yang menjadi penyebab terjadinya Gap adalah akibat kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan semua Daerah untuk melakukan Refocussing dan Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19, sehingga membuat Gap yang ada semakin jauh dari yang diharapkan, sementara untuk Realisasi Capaian Program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Tahun terakhir masa kepemimpinan Bupati terpilih sebelumnya kaitannya dengan target Renstra hanya mampu terealisasi dikisaran

antara 3,76% s/d 65,75%. Dimana yang menjadi penyebab utamanya, diantaranya adalah besaran Pagu Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene masih belum dapat mengakomodir semua Rencana Kegiatan yang ada, disamping itu Dampak kebijakan Pemerintah Pusat yang mengintruksikan kepada semua Daerah untuk melakukan Refocussing/Rasionalisasi Anggaran Akibat Covid-19, Ketersediaan dan Kompetensi ASN dan Sarana dan Prasarana Pendukung lainnya masih sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga apa yang menjadi Rencana diawal untuk kemudian dijadikan Target kinerja sulit untuk diwujudkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada Sub Bab ini, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan seperti dalam Penetapan Dokumen IKU dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene memiliki tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan Tugas, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, meliputi :

- a. Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah, pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan

- bidang koperasi, usaha kccil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - e. Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang koperasi, usaha kccil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - h. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

Adapun Penentuan IKU dan IKK yang Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene Pedomani adalah Indikator yang secara umum bersentuhan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah baik itu melalui Sektor Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan seperti pada Tabel berikut ini :

No	IKU	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisa
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	Membaiknya Kinerja Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan Sektor Ekonomi	4,55 %	4,73 %	6,16%	6,25 %	2,16 %	2,39 %	6,25 %	6,37 %	Hasil Sensus dan Survey BPS
		Persentase Koperasi Aktif	15,60 %	16,51 %	17,43 %	18,35 %	15,60 %	16,51 %	18,35 %	20,18 %	Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Total Koperasi
2	Terwujudnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Tingkat Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3,5%	3,8%	4,2%	4,5%	3,08 %	1,29 %	4,5%	4,7%	Hasil Sensus dan Survey BPS
3	Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah dari Hulu ke Hilir	Tingkat Pertumbuhan Sektor Perindustrian	2,3 %	3,5%	3,8%	4,2%	5,89 %	2,10 %	4,2%	4,5%	Hasil Sensus dan Survey BPS

4	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	78	80	78	80	80	82	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Oleh Balitbangda
		Nilai AKIP OPD	B	B	B	B	B	B	B	BB	Hasil Asesmen Tim Evaluator AKIP Inspektorat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Sub Bab ini, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, keterkaitan dengan Program Provinsi dan Kementrian Pusat dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan, apa yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam hal pencapaian target kinerja pembangunan, apa yang menjadi dampak terhadap pencapaian Visi Misi kepala Daerah terpilih, apa yang menjadi tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis yang dapat ditempuh untuk pencapaian target kinerja pembangunan.

Seperti telah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya, bahwa terdapat beberapa Indikator Utama yang bersentuhan secara langsung pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, baik pada Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pada tingkat Kementrian Pusat. Penentuan Indikator Utama merupakan target secara umum yang ditargetkan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi sampai ke Kabupaten untuk dapat saling memberikan sumbangsih dan kontribusi atas Pencapaian target tersebut.

Olehnya itu, didalam proses pencapaian target tersebut, tentu saja terdapat permasalahan dan tantangan yang dimiliki oleh masing masing Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene di atas terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Pembangunan, antara lain :

- a. Masih lemahnya Peranan Koperasi & UKM dalam Sektor Perekonomian Daerah
- b. Masih rendahnya Kompetensi para Pelaku Usaha serta Pengurus Koperasi
- c. Masih terbatasnya akses Koperasi & UKM, terhadap Permodalan, Teknologi, Legalitas Usaha dan Pasar

- d. Belum optimalnya Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap para Pengurus Koperasi dan Pelaku UKM
- e. Belum tersedianya Data Base pelaku UKM yang Komprehensif;
- f. Masih lemahnya Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam sektor perekonomian Daerah
- g. Struktur Industri masih didominasi industri skala kecil yang mengolah produk berbasis bahan baku lokal dan menggunakan teknologi sederhana
- h. Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar
- i. Mutu produk industri perlu dikembangkan sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor
- j. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha industry
- k. Perlunya dirancang perda di bidang Perindustrian yang menyangkut RPIK dan penerapan SNI wajib uji
- l. Masih rendahnya Kompetensi para Pelaku IKM
- m. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya
- n. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri
- o. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar
- p. Perlunya dirancang perda di bidang Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen
- q. Masih minimnya dukungan sarana dan prasarana pasar tradisional
- r. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga

Dari tantangan dan permasalahan di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi kesempatan dalam pengembangan organisasi ke depan, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya program dan kegiatan berikut pagu indikatifnya yang telah direncanakan dalam 5 tahun ke depan yang dapat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik;
- b. Sumberdaya Aparatur yang ada dinilai dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius;

- c. Ketersediaan teknologi informasi yang dapat mempercepat komunikasi, informasi dan pelaporan, mulai dari proses pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- d. Adanya Hubungan Kerja harmonis dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif.
- e. Secara Umum Aparatur yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan.

Beberapa isu dari permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene saat ini, yaitu:

- a. Belum optimalnya kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene, Penjelasan atas isu tersebut adalah :
 - ✓ Masih minimnya Alokasi Anggaran Belanja Pembinaan bagi Bidang Koperasi dan UKM yang jumlah Binaannya relatif banyak yang terletak di 8 Kecamatan, disamping itu juga Ketersediaan Staf belum memadai. Mengingat banyaknya jumlah Binaan baik itu Koperasi maupun pelaku UMKM, yang jumlahnya untuk Koperasi sebanyak 109 Koperasi dan untuk Pelaku UMKM sebanyak 15.657 UMKM, yang sangat tidak sebanding dengan Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana serta Alokasi Anggaran, maka sangat diharapkan perhatian dan kerjasama dengan Instansi terkait.
 - ✓ Masih minimnya Alokasi Anggaran terkait Program Kegiatan Penanganan Inflasi, Ketersediaan Perangkat Sistem dan Teknologi Informasi Harga dan Operasionalisasi Pengelolaan Pasar di 4 UPTD Pasar yang ada.
 - ✓ Masih minimnya Alokasi Anggaran Belanja Pembinaan bagi Bidang Perindustrian yang jumlah Binaannya relatif banyak yang terletak di 8 Kecamatan, ketersediaan Biaya Operasional Sarana dan Prasarana Industri dan juga Ketersediaan Staf yang belum memadai, Mengingat banyaknya jumlah Binaan pelaku IKM, yang jumlahnya sebanyak 610 yang tersebar di 8 Kecamatan, maka sangat diharapkan perhatian dan kerjasama dengan Instansi terkait, disamping itu juga Ketersediaan Rumah Kemasan, Rehabilitasi Gedung Show Room Industri sebagai Pusat Promosi Produk IKM, Ketersediaan Perangkat Sistem dan Teknologi Informasi Industri juga sangat dibutuhkan.

2.4. Review terhadap Prioritas Daerah dalam Rancangan Awal RKPD

Pada Sub Bab Ini, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, proses mengenai alasan tersebut dilakukan, penjelasan terkait temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD baik itu terkait dengan perubahan Program dan Kegiatan maupun terkait dengan besaran pagu anggaran.

Untuk menggambarkan hal tersebut, berikut disajikan Tabel Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan sebagai berikut ini :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Catatan Penting		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17			U.SA	PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														5,239,192,241		
2	17	01		PROGRA	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														5,239,192,241		
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															18,116,350		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	3.704.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.704.950			
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	1.928.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.928.950			
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	1.527.025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	1.527.025			
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	2.230.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	2.230.950			
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	1.527.025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	1.527.025			
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	10 Laporan	100 %	7.197.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	7.197.450			
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,518,705,140			
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	45 Org/Bln	100 %	3.507.590.290	Dana Transfer Umum-		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Org/Bln	3.507.590.290			

2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3 Dokumen	100 %	3.704.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3.704.950
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	3.704.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.704.950
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	24 Laporan	100 %	3.704.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	3.704.950
2				17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											459,570,080
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	3 Paket	100 %	68.190.591	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	68.190.591
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	15 Paket	100 %	16.452.000	Dana Transfer		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	15 Paket	16.452.000

2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2 Paket	100 %	13.632.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	13.632.610
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2 Paket	100 %	12.147.129	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	12.147.129
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10 Dokumen	100 %	114.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	10 Dokumen	114.130.000
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	30 Laporan	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	7.500.000

2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 Laporan	100 %	227.517.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	227.517.750
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												140,180,671	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	3.449.115	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	3.449.115
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	37.392.841	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	2 Laporan	37.392.841
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	99.338.715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	99.338.715
2	17	01	2.09	Pemeliharaan	Araan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,307,488,576	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD		100 %	1 Unit	85 %	44.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	44.480.000
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD		100 %	10 unit	85 %	52.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian	100 %	52.100.000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD		100 %	2 unit	85 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 unit	2.206,668,576
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD		100 %	12 Unit	85 %	4.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	4.240.000

2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															22,349,350	
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota															22,349,350
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Aktif	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku		16.51 %	18 Kop	18 Kop	22.349.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Kop	22.349.350	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															156,990,650	
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															156,990,650
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi Yang Terlatih di Bidang Perkoperasian		0.46 %	50 Orang	50 orang	56.990.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	156.990.650	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															2,142,687,350	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD Tahun 2023						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												2,142,687,350	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM Yang Dibina	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Dibina dan Difasilitasi		0.20 %	1 Dokumen	50 UMKM	477.207.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	24 Dok	1,929,507,350
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase UMKM Yang Dibina	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Dibina dan Difasilitasi		0.20 %	5 Orang	50 UMKM	13.180.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	205 Orang	213,180,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													510,238,050
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													300,900,000
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													300,900,000
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang Representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dikelola		70,37 %	19 Pasar	19 Pasar	300.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19 Pasar	300.900.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
			Distribusi Perdagangan							Alokasi Umum			
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												150,464,050
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota												99,203,200
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Ketercukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya		100 %	4 Laporan	8 Kecamatan	4.496.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan	4.496.200
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Ketercukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya		100 %	1 Laporan	8 Kecamatan	94.707.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di TingkatAgen dan Pasar Rakyat 1 Laporan	94.707.000
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota												51,2608500
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Ketercukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Yang Disusun		100 %	64 Laporan	36 Laporan	35.423.075	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 64 Laporan	35.423.075
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketercukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Yang Disusun		100 %	3 Laporan	36 Laporan	15.837.775	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan	15.837.775
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												58,874,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan												58,874,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Tera yang Diawasi dan Ditera		94,66 %	1914 Unit	1914 Alat Tera	34.437.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1914 Unit	34.437.000

3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Alat Tera yang Diawasi dan Ditera		94,66 %	20 Orang	1914 Alat Tera	24.437.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	24.437.000
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															38.392.750	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															38.392.750
3	31	02	2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota															38.392.750
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM Yang Dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Sentra Masyarakat	Jumlah Dokumen yang Tersedia		6,67 %	2 Dokumen	2 Dokumen	38.392.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Sentra Masyarakat	2 Dokumen	38.392.750
TOTAL																	9,316,518,967	

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Pada Sub Bab ini, berisi tentang uraian atas hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang, Hasil pokok-pokok pikiran Anggota DPRD, Hasil Musrenbang Tingkat Provinsi, LSM, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.

Adapun proses akomodir usulan untuk masing-masing para pemangku kepentingan, dilakukan dengan tahapan :

- ✓ Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten, melalui Pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kel, Tingkat Kecamatan sampai kepada tingkat Kabupaten.
- ✓ Hasil Musrenbang Tingkat Provinsi, melalui Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi.
- ✓ Hasil Pokok-Pokok Pikiran, setelah melalui hasil Verifikasi oleh Bapeda Kabupaten.
- ✓ Usulan dari LSM atau Mitra OPD, setelah melalui kegiatan Forum OPD.

Adapun Hasil Usulan yang akan diakomodir, dengan tetap memperhatikan Program Prioritas Daerah pada tahun yang bersangkutan serta Tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing OPD.

Berikut Daftar usulan dari para pemangku kepentingan, dapat digambarkan sebagaimana Tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Koperasi Yang Terlatih di Bidang Perkoperasian		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
	Sosialisasi dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Masyarakat	Majene	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi Koperasi	Majene	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM Yang Dibina		
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro Yang Dibina dan Difasilitasi		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
	Pelatihan dan pengembangan UKM untuk peningkatan kualitas UKM	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha Mikro	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Pelatihan Enterpreneurship Berbasisikan Potensi Lokal Masyarakat	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Wirausaha Muda	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Peralatan Perbengkelan	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5 Pkt	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Kewirausahaan	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD

	PELATIHAN PEMANFAATAN LIMBAH KELAPA MENJADI KERAJINAN TANGAN DAN PENINGKATAN PEMASARANNYA	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Peralatan Mesin Peras Santan dan Parut Kelapa	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5 Unit	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Peralatan Mesin Peras Santan dan Parut Kelapa	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5 Unit	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	workshop foto produk bagi pelaku UMKM	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5 Pkt	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Peralatan Perbengkelan	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5 Pkt	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Peralatan Pertukangan	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 Pkt	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Peralatan Perbengkelan	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3 Pkt	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Peralatan Pertukangan	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 Pkt	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Pelatihan Pengolahan makanan berbahan dasar Ikan	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Bantuan Alat Mesin Pembuatan Batu Merah Bagi Lingkungan Lembang	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 Unit	Musrenbang
	Pelatihan terkait Manajemen pengelolaan usaha se-Kelurahan Baurung	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Musrenbang
	Pengadaan Alat Pengolahan Kelapa Bagi Kelurahan Labuang Utara	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 Unit	Musrenbang
	Pelatihan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan se-Kelurahan Galung	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Musrenbang
	Pelatihan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan se-Kelurahan Pangali-Ali	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Musrenbang
	Pelatihan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Se-Kelurahan Malunda	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Musrenbang
	Pengadaan Alat Pengolahan Kelapa Untuk Kelurahan Malunda	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 Unit	Musrenbang
	Bantuan Mesin Jahit Untuk Kelurahan Lamungan Batu	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 Unit	Musrenbang
	Pengadaan Alat Pertukangan Kayu Kelompok LINGKAR	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 Pkt	Musrenbang
	Pelatihan Pembuatan Kue kemasan oleh klp. PKK Desa Bambang	Majene	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Orang	Musrenbang
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
	Sosialisasi PP No 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Majene	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Koperasi	Majene	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Sosialisasi Sertifikasi Halal, SP-PIRT dan BPOM Dalam Menunjang Produktivitas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Majene	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	Pokok-Pokok Pikiran DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Sub Bab ini, berisikan tentang Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana strategis, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene, tidak hanya merujuk pada RPJMD Kab. Majene semata, melainkan perlu ada pula sinkronisasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah lembaga terkait yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementrian Perindustrian serta Kementrian Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dimaksudkan agar program-program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene dapat disinergikan dengan program-program pada level provinsi dan nasional. Sinergitas yang merupakan salah satu nilai organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ini akan menunjang pelaksanaan program prioritas baik mulai dari segi koordinasi, kerjasama, pengembangan SDM hingga pada penganggaran. Dengan itu diharapkan mentalitas profesional, produktif, dan proaktif sebagaimana terpatri dalam Visi Kab. Majene dapat terbangun secara optimal.

Dalam perwujudan visi dan misinya, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementrian Perindustrian serta Kementrian Perdagangan telah merumuskan tujuan dan sasaran berikut indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran & Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional	Terwujudnya koperasi Berkualitas
			Terwujudnya peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola usaha kepada pembina / UMKM / koperasi di sektor riil;
			Terwujudnya Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI
			Terwujudnya tenaga penyuluh yang terekrut dan terlatih
		Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi
		Peningkatan Daya Saing	Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan Produk
			Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan
		Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM
			Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak
2	Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden / Pemerintah	Keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah / Presiden	Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden

Tujuan, Sasaran & Indikator Kinerja Kementerian Perindustrian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing	Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian nasional	Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM
			Penyerapan tenaga kerja IKM
		Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang terhadap total populasi industri besar sedang nasional
		Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional	Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi

Tujuan, Sasaran & Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Peningkatan pengamanan perdagangan	Meningkatnya Pengamanan Perdangan dan kebijakan nasional	Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor
2	Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang dan jasa	Persentase barang impor berSNI wajib yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan
			Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Sub Bab ini, berisikan tentang Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan Sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene Tahun 2021 - 2026 maka tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang berkembang, berkualitas, dan berdaya saing dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas berbasis SDA, dengan sasaran :

- ✓ Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM yang berkembang, berkualitas dan berdaya saing.
 - ✓ Meningkatnya Sektor Perdagangan dalam Negeri yang berkualitas, Mandiri dan berdaya saing.
 - ✓ Meningkatnya Sektor Industri yang berdaya saing.
2. Meningkatnya kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, dengan sasaran :
- ✓ Meningkatnya Nilai AKIP OPD.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan ke depannya yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene adalah :

1. Majene Unggul, Mandiri, dan Religius (UMR), sebagai visi Kab. Majene harus menjadi acuan dan pedoman tidak saja bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan tetapi menjadi mentalitas seluruh warga daerah dalam membangun daerahnya;
2. Pemenuhan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai kerangka pencapaian visi Majene ke depannya dalam upaya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene sebagai institusi yang menangani urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, sebagaimana yang diatur dalam UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
4. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, masih belum diimbangi dengan dukungan penganggaran yang memadai serta Perda-perda yang mengatur terkait dengan urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, hal ini ditandai dengan masih belum optimalnya kontribusi sektor Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap pertumbuhan Perekonomian yang terjadi di Kab. Majene;
5. Partisipasi para Pelaku Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian masih perlu untuk dikembangkan dan kemudian dimanfaatkan secara optimal dan efisien didalam mendukung Pembangunan di Kab. Majene.

Berdasarkan Rumusan di atas, maka target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
1.	Meningkatnya Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang berkembang, berkualitas, dan berdaya saing dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas berbasis SDA.	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM yang berkembang, berkualitas dan berdaya saing.	Persentase Koperasi Yang Aktif	13,76 %
			Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0,46 %
			Persentase UMKM Yang Diberdayakan	0,12 %
			Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	0,40 %
		Meningkatnya Sektor Perdagangan dalam Negeri yang berkualitas, Mandiri dan berdaya saing	Persentase Pasar Rakyat Dalam Kondisi Baik	100 %
			Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Daerah	100 %
			Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	100 %
		Meningkatnya Sektor Industri yang berdaya saing	Persentase Sentra Industri Aktif	66,67%
			Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri	16,67%
			Persentase IKM Yang Terdaftar di SIINas	100%
2.	Meningkatnya kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP	Predikat B
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan	Point 80

		Publik yang transparan dan akuntabel	Masyarakat	
--	--	--	------------	--

3.2. Program dan Kegiatan

Pada Sub Bab ini, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Di Tahun 2020 yang lalu, Kabupaten Majene baru saja melakukan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak, oleh sebab itu, dalam Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2024 ini, mengalami perubahan terkait dengan Arah Kebijakan yang mesti di Pedomani didalam menentukan target Program dan Kegiatan, sebagai mana yang terdapat didalam Surat Edaran Mendagri RI Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sehingga yang menjadi dasar untuk dijadikan pedoman adalah RPJPD Kabupaten/Kota tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, Program dan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana terlihat pada Tabel 2 terlampir :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Adapun untuk menggambarkan Rencana Kerja dan Sumber Pendanaannya, dapat dilihat secara rinci, seperti pada Lampiran Tabel 2.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam RPJPD 2005 - 2025.

Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Tahun 2024 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene dan kinerja pegawai.

Demikianlah penyusunan Dokumen Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene tahun 2024, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian visi, misi dan tujuan OPD Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene serta mendukung visi dan misi Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Lampiran 1 :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			OPD Pena nggu ng Jawa b
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1					2	3	4			5			6			7=6/5*100			8			9=8/4*100			10
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 0	%	21.789.0 00.000,0 0	10 0	%	11.012.9 24.707,0 0	10 0	%	3.584.38 3.278,00	10 0	%	32,55	10 0	%	7.822.55 7.206,00	10 0	%	35,90	Dinas Kope rinda ng
2	1	0	2.		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 0	%	206.000. 000,00	10 0	%	88.947.1 00,00	10 0	%	7.664.89 5,00	10 0	%	8,62	10 0	%	25.780.1 95,00	10 0	%	12,51	
2	1	0	2.	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Do k	60.000.0 00,00	1	Do k	26.572.80 0,00	1	Do k	1.392.305 ,00	100	%	5,24	2	Do k	5.096.205 ,00	10 0	%	8,49	

2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	18.000.000,00	1	Dok	7.936.900,00	1	Dok	1.094.225,00	100	%	13,79	2	Dok	3.023.175,00	100	%	16,80	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dok	18.000.000,00	1	Dok	6.995.900,00	1	Dok	1.526.885,00	100	%	21,83	2	Dok	3.053.910,00	100	%	16,97	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	18.000.000,00	1	Dok	7.936.900,00	1	Dok	1.173.345,00	100	%	14,78	2	Dok	3.404.295,00	100	%	18,91	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	18.000.000,00	1	Dok	6.995.900,00	1	Dok	686.665,00	100	%	9,82	2	Dok	2.213.690,00	100	%	12,30	

2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	La p	50.000.000,00	10	La p	21.952.800,00	10	La p	1.791.470,00	100	%	8,16	20	La p	8.988.920,00	100	%	17,98	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	La p	24.000.000,00	1	La p	10.555.900,00	0	La p	-	0	%	-	0	La p	-	0	%	-	
2	17	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	10.110.000.000,00	100	%	5.014.077.770,00	100	%	2.874.164.409,00	100	%	57,32	100	%	5.617.017.862,00	100	%	55,56	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Or g	10.000.000.000,00	50	Or g	4.972.478.920,00	34	Or g	2.870.070.524,00	68	%	57,72	68	Or g	5.601.809.127,00	68	%	56,02	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Do k	10.000.000,00	50	Do k	3.099.400,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	Do k	30.000.000,00	25	Do k	12.375.550,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	

2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dok	24.000.000,00	3	Dok	9.401.650,00	3	Dok	1.364.015,00	100	%	14,51	6	Dok	5.068.965,00	100	%	21,12	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Lap	20.000.000,00	1	Lap	7.936.900,00	1	Lap	1.364.935,00	100	%	17,20	2	Lap	5.069.885,00	100	%	25,35	
2	17	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	10.000.000,00	2	Dok	3.805.900,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	48	Lap	10.000.000,00	24	Lap	3.377.550,00	24	Lap	1.364.935,00	100	%	40,41	48	Lap	5.069.885,00	100	%	50,70	
2	17	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8	Dok	6.000.000,00	4	Dok	1.601.900,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	

2	17	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	96.000.000,00	100	%	36.981.400,00	100	%	-	100	%	-	100	%	-	100	%	-	
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Lap	6.000.000,00	1	Lap	1.601.900,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dok	50.000.000,00	1	Dok	21.921.900,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
2	17	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	Lap	10.000.000,00	1	Lap	3.921.900,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
2	17	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lap	10.000.000,00	1	Lap	3.921.900,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lap	10.000.000,00	1	Lap	2.806.900,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	

2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	La p	10.000.000,00	1	La p	2.806.900,00	0	La p	-	0	%	-	0	La p	-	0	%	-	
2	17	01	2.04		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	124.000.000,00	100	%	52.167.300,00	100	%	-	100	%	-	100	%	-	100	%	-	
2	17	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Do k	16.000.000,00	1	Do k	6.880.900,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
2	17	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2	Do k	16.000.000,00	1	Do k	6.880.900,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
2	17	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2	La p	10.000.000,00	1	La p	3.966.900,00	0	La p	-	0	%	-	0	La p	-	0	%	-	
2	17	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	100	Da ta	40.000.000,00	50	Da ta	16.709.900,00	0	Da ta	-	0	%	-	0	Da ta	-	0	%	-	

2	17	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2	Lap	16.000.000,00	1	Lap	6.880.900,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
2	17	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2	Dok	16.000.000,00	1	Dok	6.880.900,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Lap	10.000.000,00	1	Lap	3.966.900,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
2	17	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	324.000.000,00	100	%	131.699.750,00	100	%	1.800.000,00	100	%	1,37	100	%	3.600.000,00	100	%	1,11	
2	17	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	54	Unit	60.000.000,00	27	Unit	25.641.000,00	0	Unit	-	0	%	-	0	Unit	-	0	%	-	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Pkt	14.000.000,00	1	Pkt	5.531.500,00	0	Pkt	-	0	%	-	0	Pkt	-	0	%	-	
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dok	16.000.000,00	1	Dok	6.947.150,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	

2	17	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dok	6.000.000,00	1	Dok	1.716.900,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
2	17	01	205	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dok	10.000.000,00	1	Dok	3.966.900,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
2	17	01	205	06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	4	Peg	16.000.000,00	2	Peg	6.250.000,00	2	Peg	1.800.000,00	100	%	28,80	4	Peg	3.600.000,00	100	%	22,50	
2	17	01	205	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2	ASN	10.000.000,00	1	ASN	4.250.000,00	0	ASN	-	0	%	-	0	ASN	-	0	%	-	
2	17	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	Peg	160.000.000,00	12	Peg	64.687.400,00	0	Peg	-	0	%	-	0	Peg	-	0	%	-	
2	17	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74	Org	10.000.000,00	37	Org	3.312.900,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	
2	17	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Org	22.000.000,00	2	Org	9.396.000,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	

2	17	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	4.312.000.000,00	100	%	1.952.763.884,00	100	%	417.104.620,00	100	%	21,36	100	%	1.142.032.109,00	100	%	26,48	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	2	Pkt	30.000.000,00	1	Pkt	13.856.250,00	0	Pkt	-	0	%	-	0	Pkt	-	0	%	-	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	Pkt	760.000.000,00	11	Pkt	350.143.061,00	0	Pkt	-	0	%	-	0	Pkt	-	0	%	-	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Pkt	180.000.000,00	6	Pkt	76.931.970,00	0	Pkt	-	0	%	-	0	Pkt	-	0	%	-	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Pkt	30.000.000,00	2	Pkt	13.671.500,00	2	Pkt	9.868.750,00	100	%	72,18	4	Pkt	23.501.360,00	100	%	78,34	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Pkt	24.000.000,00	3	Pkt	9.440.500,00	3	Pkt	4.599.080,00	100	%	48,72	6	Pkt	16.746.209,00	100	%	69,78	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	34	Pkt	2.400.000.000,00	17	Pkt	1.118.320.000,00	12	Pkt	305.000.000,00	70,588	%	27,27	24	Pkt	769.130.000,00	70,59	%	32,05	

2	17	01	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	La p	40.000.000,00	1	La p	19.200.000,00	1	La p	7.456.790,00	100	%	38,84	2	La p	14.956.790,00	100	%	37,39	
2	17	01	206	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	La p	800.000.000,00	2	La p	328.408.000,00	2	La p	90.180.000,00	100	%	27,46	4	La p	317.697.750,00	100	%	39,71	
2	17	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Do k	24.000.000,00	1	Do k	10.792.603,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
2	17	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Do k	24.000.000,00	1	Do k	12.000.000,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
2	17	01	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan BMD Di OPD	85	%	994.000.000,00	80	%	1.115.261.095,00	80	%	-	100	%	-	80	%	-	94,1	%	-	
2	17	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Un it	-	0	Un it	-	0	Un it	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	0	Un it	-	###	%	#DIV/0!	

2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	300.000.000,00	5	Unit	140.915.000,00	0	Unit	-	0	%	-	0	Unit	-	0	%	-	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Pkt	400.000.000,00	5	Pkt	181.509.808,00	0	Pkt	-	0	%	-	0	Pkt	-	0	%	-	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	0	Unit	-	###	%	#DIV/0!	
2	17	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10	Unit	34.000.000,00	5	Unit	15.940.358,00	0	Unit	-	0	%	-	0	Unit	-	0	%	-	
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	100.000.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	0	Unit	-	0	%	-	
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	160.000.000,00	5	Unit	776.895.929,00	0	Unit	-	0	%	-	0	Unit	-	0	%	-	
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	0	Unit	-	###	%	#DIV/0!	
2	17	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100	%	870.000.000,00	100	%	405.050.730,00	100	%	93.789.466,00	100	%	23,15	100	%	213.531.287,00	100	%	24,54	

					Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah																			
2	1 7	0 1	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	La p	10.000.0 00,00	2	La p	4.412.000 ,00	0	La p	-	0	%	-	2	La p	3.449.115 ,00	50	%	34,49	
2	1 7	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	La p	500.000. 000,00	2	La p	236.822.1 50,00	2	La p	37.392.84 1,00	100	%	15,79	4	La p	65.785.68 2,00	10 0	%	13,16	
2	1 7	0 1	2. 08	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	La p	-	0	La p	-	0	La p	-	#DI V/ 0!	%	#DIV/0!	0	La p	-	## ## ##	%	#DIV/0!	
2	1 7	0 1	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	La p	360.000. 000,00	1	La p	163.816.5 80,00	1	La p	56.396.62 5,00	100	%	34,43	2	La p	144.296.4 90,00	10 0	%	40,08	
2	1 7	0 1	2. 09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD	85	%	4.753.00 0.000,00	80	%	2.215.97 5.678,00	80	%	189.859. 888,00	10 0	%	8,57	80	%	820.595. 753,00	94, 1	%	17,26	

2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	180.000.000,00	1	Unit	44.480.000,00	1	Unit	39.580.000,00	100	%	88,98	2	Unit	127.479.865,00	100	%	70,82	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	150.000.000,00	10	Unit	74.480.000,00	10	Unit	50.279.888,00	100	%	67,51	20	Unit	101.379.888,00	100	%	67,59	
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Jenis	10.000.000,00	2	Jenis	2.450.000,00	0	Jenis	-	0	%	-	0	Jenis	-	0	%	-	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	0	Unit	-	###	%	#DIV/0!	
2	17	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	0	Unit	-	###	%	#DIV/0!	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit	4.400.000.000,00	15	Unit	2.088.205.678,00	3	Unit	100.000.000,00	20	%	4,79	6	Unit	587.496.000,00	20	%	13,35	

2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	0	Unit	-	###	%	#DIV/0!	
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	13.000.000,00	12	Unit	6.360.000,00	0	Unit	-	0	%	-	12	Unit	4.240.000,00	50	%	32,62	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM				17.148.000.000,00			8.254.363.959,00			171.254.775,00			41,96			4.338.931.675,00			140,20	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP Yang Difasilitasi Perizinannya	65,00	%	58.000.000,00	65,00	%	27.603.200,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	-	0	%	-	Dinas Koperindag
2	17	02	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan	52	Izin	30.000.000,00	26	Izin	13.801.600,00	0	Izin	-	0	%	-	0	Izin	-	0	%	-	

2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	52	KS P	30.000.000,00	26	KS P	13.801.600,00	0	KS P	-	0	%	-	0	KS P	-	0	%	-	
2	17	02	02.02		Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Usaha Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Yang Diterbitkan	52	Izin	28.000.000,00	26	Izin	13.801.600,00	0	Izin	-	0	%	-	0	Izin	-	0	%	-	

2	17	02	02.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	52	KS P	28.000.000,00	26	KS P	13.801.600,00	0	KS P	-	0	%	-	0	KS P	-	0	%	-	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Aktif	47,71	%	110.000.000,00	23,85	%	50.649.450,00	21,10	%	13.381.400,00	88,46	%	26,42	42,20	%	35.730.750,00	88,5	%	32,48	Dinas Kope rinda g
2	17	03	2.01		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	52	Ko p	110.000.000,00	26	Ko p	50.649.450,00	23	Ko p	13.381.400,00	88,462	%	26,42	46	Ko p	35.730.750,00	88,5	%	32,48	

2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	52	Ko p	80.000.000,00	26	Ko p	36.847.850,00	23	Ko p	13.381.400,00	88,462	%	36,32	46	Ko p	35.730.750,00	88,46	%	44,66	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	52	Ko p	30.000.000,00	26	Ko p	13.801.600,00	0	Ko p	-	0	%	-	0	Ko p	-	0	%	-	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Yang Sesuai Dengan Kriteria Penilaian	130,00	%	270.000.000,00	65,00	%	129.964.200,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	-	0	%	-	Dinas Kope rinda g
2	17	04	2.01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP dan USP Yang Sehat	52	KS P	270.000.000,00	26	KS P	129.964.200,00	0	KS P	-	0	%	-	0	KS P	-	0	%	-	

2	174	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	52	KSP	30.000.000,00	26	KSP	13.801.600,00	0	KSP	-	0	%	-	0	KSP	-	0	%	-	
2	174	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	218	Kop	240.000.000,00	109	Kop	116.162.600,00	0	Kop	-	0	%	-	0	Kop	-	0	%	-	
2	175			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11,97	%	1.300.000.000,00	3,68	%	399.237.400,00	0,46	%	50.000.000,00	12,50	%	12,52	6,90	%	758.568.349,00	57,7	%	58,35	Dinas Koperasi
2	175	2.01		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Terlatih di Bidang Perkoperasian	1000	Org	1.000.000.000,00	250	Org	250.000.000,00	50	Org	50.000.000,00	20	%	20,00	750	Org	758.568.349,00	75	%	75,86	
2	175	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Pelatihan Koperasi)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1000	Org	1.000.000.000,00	250	Org	250.000.000,00	50	Org	50.000.000,00	20	%	20,00	750	Org	758.568.349,00	75	%	75,86	
2	175	02.02		Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Terlatih di Bidang UKM	100	Org	100.000.000,00	50	Org	49.745.800,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	

					ta																				
2	17	05	02.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	100	Org	100.000.000,00	50	Org	49.745.800,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	
2	17	05	02.03		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Terlatih di Bidang Usaha Mikro	200	Org	200.000.000,00	100	Org	99.491.600,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	
2	17	05	02.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM Usaha Mikro yang Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan	200	Org	200.000.000,00	100	Org	99.491.600,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	18,90	%	430.000.000,00	9,45	%	212.398.400,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	-	0	%	-	Dinas Koperasi
2	17	06	2.01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Koperasi Yang Diberdayakan	20,6	SDM	430.000.000,00	10,3	SDM	212.398.400,00	0	SDM	-	0	%	-	0	SDM	-	0	%	-	

					Kabupaten/ Kota																				
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Pameran Koperasi & Bantuan Modal)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	6	SDM	230.000.000,00	3	SDM	112.906.800,00	0	SDM	-	0	%	-	0	SDM	-	0	%	-	
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	200	Org	200.000.000,00	100	Org	99.491.600,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	

2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	60,43	%	7.180.000.000,00	18,12	%	3.569.525.966,00	0,83	%	107.354.850,00	4,60	%	3,01	23,65	%	3.544.114.051,00	39,1	%	49,36	Dinas Kope rinda g
2	17	07	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang Dibina dan Difasilitasi	9064	U M	7.180.000.000,00	2718	U M	3.569.525.966,00	125	U M	107.354.850,00	4,599	%	3,01	3548	U M	3.544.114.051,00	39,1	%	49,36	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Bantuan Modal & Pameran UKM, Studi Banding)	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	5000	U M	2.900.000.000,00	700	U M	1.442.294.566,00	25	U M	7.354.850,00	3,5714	%	0,51	3395	U M	3.381.188.251,00	67,9	%	116,59	

2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	U M	200.000.000,00	100	U M	99.491.600,00	0	U M	-	0	%	-	0	U M	-	0	%	-	
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	400	U M	400.000.000,00	200	U M	198.983.200,00	0	U M	-	0	%	-	0	U M	-	0	%	-	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	8	U M	90.000.000,00	4	U M	43.826.800,00	0	U M	-	0	%	-	0	U M	-	0	%	-	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	56	U M	190.000.000,00	14	U M	93.572.600,00	0	U M	-	0	%	-	53	U M	62.925.800,00	94,64	%	33,12	
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Pelatihan Kewirausahaan)	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	3400	U M	3.400.000.000,00	1700	U M	1.691.357.200,00	100	U M	100.000.000,00	5,8824	%	5,91	100	U M	100.000.000,00	2,941	%	2,94	

2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	10,00	%	7.800.000.000,00	4,91	%	3.864.985.343,00	0,01	%	518.525,00	0,14	%	0,01	0,01	%	518.525,00	0,07	%	0,01	Dinas Kope rinda g
2	17	08	2.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Dikembangkan Menjadi Usaha Kecil	1500	U M	7.800.000.000,00	737	U M	3.864.985.343,00	1	U M	518.525,00	0,1357	%	0,01	1	U M	518.525,00	0,07	%	0,01	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Bantuan Peralatan)	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1500	U M	7.800.000.000,00	737	U M	3.864.985.343,00	1	U M	518.525,00	0,1357	%	0,01	1	U M	518.525,00	0,067	%	0,01	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.160.000.000,00			6.438.342.946,00			362.057.725,00			40,29			1.108.258.543,00			52,84	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan Yang Diterbitkan	5,55	%	298.000.000,00	2,77	%	134.170.000,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	-	0	%	-	Dinas Kope rinda g
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Usaha Yang Memperoleh Rekomendasi	800	Re k	34.000.000,00	400	Re k	15.388.600,00	0	Re k	-	0	%	-	0	Re k	-	0	%	-	

3	302	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800	Rek	34.000.000,00	400	Rek	15.388.600,00	0	Rek	-	0	%	-	0	Rek	-	0	%	-	
3	302	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang Yang Diterbitkan	4	Do k	34.000.000,00	2	Do k	15.941.850,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
3	302	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4	Do k	34.000.000,00	2	Do k	15.941.850,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
3	302	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah STPW Yang Diterbitkan	8	Do k	68.000.000,00	4	Do k	31.883.700,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
3	302	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	4	Do k	34.000.000,00	2	Do k	15.941.850,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	

3	302	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	4	Dok	34.000.000,00	2	Dok	15.941.850,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	302	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah SIUP Minuman Beralkohol Yang Diterbitkan	4	SIUP	34.000.000,00	2	SIUP	15.941.850,00	0	SIUP	-	0	%	-	0	SIUP	-	0	%	-	
3	302	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	SIUP	34.000.000,00	2	SIUP	15.941.850,00	0	SIUP	-	0	%	-	0	SIUP	-	0	%	-	

3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyimpanan Bahan Berbahaya Yang Dikendalikan dan diawasi	12	Lap	94.000.000,00	6	Lap	39.072.150,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4	Lap	30.000.000,00	2	Lap	11.565.150,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	4	Keg	34.000.000,00	2	Keg	15.941.850,00	0	Keg	-	0	%	-	0	Keg	-	0	%	-	

3	302	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4	La p	30.000.000,00	2	La p	11.565.150,00	0	La p	-	0	%	-	0	La p	-	0	%	-	
3	302	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah SKA Yang Diterbitkan	4	Do k	34.000.000,00	2	Do k	15.941.850,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
3	302	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4	Do k	34.000.000,00	2	Do k	15.941.850,00	0	Do k	-	0	%	-	0	Do k	-	0	%	-	
3	303			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Dalam Kondisi Baik	86,36	%	10.284.000.000,00	86,36	%	5.078.635.196,00	54,55	%	270.402.800,00	63,16	%	5,32	54,55	%	828.967.849,00	63,2	%	8,06	Dinas Kope rinda g
3	303	2.01		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dikelola	58	SD P	9.900.000.000,00	29	SD P	4.891.939.796,00	19	SD P	270.402.800,00	65,517	%	5,53	17	SD P	580.238.849,00	29,3	%	5,86	
3	303	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	20	SD P	7.000.000.000,00	10	SD P	3.465.085.396,00	0	SD P	-	0	%	-	1	SD P	49.999.999,00	5	%	0,71	

3	303	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	38	SDP	2.900.000.000,00	19	SDP	1.426.854.400,00	19	SDP	270.402.800,00	100	%	18,95	16	SDP	530.238.850,00	42,11	%	18,28	
3	303	2.02		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina	8	Org	384.000.000,00	4	Org	186.695.400,00	0	Org	-	0	%	-	5	Org	248.729.000,00	62,5	%	64,77	
3	303	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	Dok	34.000.000,00	1	Dok	15.824.150,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	303	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6	Dok	350.000.000,00	3	Dok	170.871.250,00	0	Dok	-	0	%	-	5	Dok	248.729.000,00	83,33	%	71,07	
3	304			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Daerah	100	%	750.000.000,00	100	%	343.430.400,00	100	%	66.709.000,00	100,00	%	19,42	100	%	175.095.050,00	100	%	23,35	Dinas Kope rinda g
3	304	2.01		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	8	Ke c	380.000.000,00	8	Ke c	177.011.050,00	8	Ke c	35.000.850,00	100	%	19,77	8	Ke c	104.401.050,00	100	%	27,47	

					di tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
3	304	2.01	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Lap	40.000.000,00	6	Lap	18.779.550,00	4	Lap	5.000.850,00	66,667	%	26,63	8	Lap	9.497.050,00	66,67	%	23,74	
3	304	2.01	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Lap	40.000.000,00	6	Lap	18.010.950,00	0	Lap	-	0	%	-	0	Lap	-	0	%	-	
3	304	2.01	01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	Lap	300.000.000,00	1	Lap	140.220.550,00	1	Lap	30.000.000,00	100	%	21,39	2	Lap	94.904.000,00	100	%	31,63	

3	304	2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Yang Disusun	36	La p	250.000.000,00	36	La p	118.325.900,00	36	La p	31.708.150,00	100	%	26,80	36	La p	70.694.000,00	100	%	28,28		
3	304	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8	La p	90.000.000,00	4	La p	43.513.550,00	0	La p	-	0	%	-	0	La p	-	0	%	-	
3	304	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	128	La p	90.000.000,00	64	La p	44.059.800,00	64	La p	24.213.800,00	100	%	54,96	128	La p	52.611.875,00	100	%	58,46	

3	304	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	Lap	70.000.000,00	3	Lap	30.752.550,00	3	Lap	7.494.350,00	100	%	24,37	6	Lap	18.082.125,00	100	%	25,83	
3	304	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HOK Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Yang dilakukan	12	HOK	120.000.000,00	6	HOK	48.093.450,00	0	HOK	-	0	%	-	0	HOK	-	0	%	-	
3	304	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4	Dok	40.000.000,00	2	Dok	16.031.150,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	304	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4	Dok	40.000.000,00	2	Dok	16.031.150,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	304	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	Dok	40.000.000,00	2	Dok	16.031.150,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	

3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Usaha Komoditi Ekspor Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan	0,09	%	824.000.000,00	0,05	%	396.785.100,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	54.820.144,00	0	%	6,65	Dinas Kope rinda g
3	30	5	2.01		Kegiatan Penyelenggara an Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor Unggulan	136	Ev en t	824.000.000,00	63	Ev en t	396.785.100,00	0	Ev en t	-	0	%	-	8	Ev en t	54.820.144,00	5,88	%	6,65	
3	30	5	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kot a	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	4	Pel	40.000.000,00	2	Pel	16.031.150,00	0	Pel	-	0	%	-	0	Pel	-	0	%	-	
3	30	5	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	16	Pel	230.000.000,00	3	Pel	112.906.800,00	0	Pel	-	0	%	-	8	Pel	54.820.144,00	50	%	23,83	
3	30	5	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	120	Pel	350.000.000,00	60	Pel	172.450.000,00	0	Pel	-	0	%	-	0	Pel	-	0	%	-	
3	30	5	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6	Pel	160.000.000,00	3	Pel	75.164.100,00	0	Pel	-	0	%	-	0	Pel	-	0	%	-	

3	305	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	4	Pr od	10.000.000,00	2	Pr od	4.201.900,00	0	Pr od	-	0	%	-	0	Pr od	-	0	%	-	
3	305	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4	Pel	34.000.000,00	2	Pel	16.031.150,00	0	Pel	-	0	%	-	0	Pel	-	0	%	-	
3	306			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	100	%	334.000.000,00	100	%	160.511.600,00	28,2	%	24.945.925,00	28,21	%	15,54	28,2	%	49.375.500,00	28,2	%	14,78	Dinas Kope rinda g
3	306	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Tera Yang Diawasi dan Ditera	1914	Un it	334.000.000,00	1914	Un it	160.511.600,00	540	Un it	24.945.925,00	28,213	%	15,54	540	Un it	49.375.500,00	28,2	%	14,78	
3	306	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000	Ala t	160.000.000,00	1914	Ala t	78.692.050,00	540	Ala t	24.945.925,00	28,213	%	31,70	1080	Ala t	49.375.500,00	27	%	30,86	
3	306	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	4000	Pel	140.000.000,00	1914	Pel	65.788.400,00	0	Pel	-	0	%	-	0	Pel	-	0	%	-	
3	306	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	200	Un it	34.000.000,00	100	Un it	16.031.150,00	0	Un it	-	0	%	-	0	Un it	-	0	%	-	
3	307			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Usaha Mikro Yang Mendapat Fasilitas Pemasaran	1,13	%	670.000.000,00	0,57	%	324.810.650,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	-	0	%	-	Dinas Kope rinda g

3	30	07	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran yang dilakukan	1	Event	670.000.000,00	1	Event	324.810.650,00	0	Event	-	0	%	-	0	Event	-	0	%	-	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120	UMKM	350.000.000,00	60	UMKM	172.450.000,00	0	UMKM	-	0	%	-	0	UMKM	-	0	%	-	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	UMKM	80.000.000,00	25	UMKM	36.740.150,00	0	UMKM	-	0	%	-	0	UMKM	-	0	%	-	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	50	Data	40.000.000,00	25	Data	16.128.900,00	0	Data	-	0	%	-	0	Data	-	0	%	-	

3	307	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	200	Org	200.000.000,00	100	Org	99.491.600,00	0	Org	-	0	%	-	0	Org	-	0	%	-	
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.340.000.000,00			2.630.669.050,00			12.531.600,00			0,49			395.513.351,00			7,64	
3	312			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Sentra Industri Aktif	66,67	%	5.180.000.000,00	33,33	%	2.557.017.400,00	0,00	%	12.531.600,00	0,00	%	0,49	0,00	%	395.513.351,00	0	%	7,64	Dinas Kope rinda g
3	312	2.01		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	94	Dok	5.180.000.000,00	47	Dok	2.557.017.400,00	2	Dok	12.531.600,00	4,253	%	0,49	8	Dok	395.513.351,00	8,51	%	7,64	
3	312	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2	Dok	430.000.000,00	1	Dok	213.903.900,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	

3	312	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2	Dok	50.000.000,00	1	Dok	22.135.550,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	312	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	Dok	50.000.000,00	1	Dok	22.135.550,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	312	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	62	Dok	3.400.000.000,00	31	Dok	1.678.935.550,00	0	Dok	-	0	%	-	1	Dok	100.000.001,00	1,613	%	2,94	
3	312	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Monev IKM/BDI/Pelatihan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	24	Dok	1.200.000.000,00	12	Dok	596.705.450,00	2	Dok	12.531.600,00	16,667	%	2,10	7	Dok	295.513.350,00	29,17	%	24,63	

3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2	Dok	50.000.000,00	1	Dok	23.201.400,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM Yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	50,00	%	80.000.000,00	33,33	%	36.208.200,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	-	0	%	-	Dinas Kope rinda g
3	31	03	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Jumlah Rekomendasi Perizinan IKM Yang Didata dan Ditangani	100	Surat	80.000.000,00	100	Surat	36.208.200,00	0	Surat	-	0	%	-	0	Surat	-	0	%	-	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	8	Dok	40.000.000,00	4	Dok	18.104.100,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	

3	313	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Dok	40.000.000,00	4	Dok	18.104.100,00	0	Dok	-	0	%	-	0	Dok	-	0	%	-	
3	314	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM Yang Terdaftar di SIINas	50,00	%	80.000.000,00	33,33	%	37.443.450,00	0,00	%	-	0,00	%	-	0,00	%	-	0	%	-	Dinas Kope rinda g
3	314	04	2.01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Terdata melalui SIINas	100	IKM	80.000.000,00	100	IKM	37.443.450,00	0	IKM	-	0	%	-	0	IKM	-	0	%	-	

[illegible]

	57.437.000,00	28.336.300,662,00	4.130.227.378,00	14,58	13.665.260.775,00	23,79	
--	---------------	-------------------	------------------	-------	-------------------	-------	--

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian					9.517.859.578,00					5.947.453.041,00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.945.227.903,00					5.685.722.241,00			
2	1 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.945.227.903,00					5.685.722.241,00			
2	1 7	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.370.782.753,00					5.287.202.241,00			
2	1 7	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.108.575,00					30.116.350,00			
2	1 7	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.700.625,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.704.950,00	
2	1 7	0 1	2. 01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.928.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3.928.950,00	
2	1 7	0 1	2. 01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.526.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.527.025,00
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	2.229.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.230.950,00
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.526.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.527.025,00
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Laporan	100 %	7.196.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9.197.450,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.518.661.250,00				3.526.705.140,00
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	34 Orang/bulan	100 %	3.507.550.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.509.590.290,00
2	17	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	3.703.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	5.704.950,00
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.703.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.704.950,00
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	100 %	3.703.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	5.704.950,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.800.000,00					3.800.000,00
2	17	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	100 %	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	3.800.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								455.888.930,00					471.580.080,00
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

	7	1	06	02														
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	100 %	64.623.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.190.591,00
2	1 7	0 1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	15 Paket	100 %	16.429.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	18.452.000,00
2	1 7	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	13.632.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.632.610,00
2	1 7	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	12.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.147.129,00
2	1 7	0 1	2. 06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	10 Dokumen	100 %	114.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	114.130.000,00
2	1 7	0 1	2. 06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	100 %	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	9.500.000,00
2	1 7	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	100 Laporan	100 %	227.474.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	229.527.750,00
2	1 7	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.177.998,00					146.180.671,00
2	1 7	0 1	2. 08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	3.448.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.449.115,00
2	1 7	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	37.391.898,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	39.392.841,00
2	1 7	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	99.337.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	101.338.715,00
2	1 7	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.236.146.000,00				1.108.820.000,00
2	1 7	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	44.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.480.000,00
2	1 7	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	52.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	54.100.000,00
2	1 7	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	2.135.906.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.002.000.000,00
2	1 7	0 1	2. 09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan BMD OPD	- Kab. Majene, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	12 Unit	100 %	3.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	6.240.000,00
2	1 7	0 3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								22.349.200,00					24.349.350,00
2	1 7	0 3	2. 01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								22.349.200,00					24.349.350,00
2	1 7	0 3	2. 01	00 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													

						Persentase koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi Yang Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku umlah Koperasi Yang Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.51 %	18 Unit Usaha	18 uni usaha 18 Koperasi	22.349.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18 Unit Usaha	24.349.350,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								207.155.750,00				158.990.650,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								207.155.750,00				158.990.650,00
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi												
						Persentase Pengelola Koperasi Yang Bersertifikat	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM Yang Terlatih di Bidang Perkoperasian	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.84 %	200 Orang	200 Orang	207.155.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 Orang	158.990.650,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								213.280.000,00				215.180.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								213.280.000,00				215.180.000,00
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro												
						Persentasi UMKM yang dibina	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Dibina dan Difasilitasi	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.61 Persen	205 Orang	2155 UMKM	213.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	205 Orang	215.180.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								2.131.660.200,00				0,00
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								2.131.660.200,00				0,00
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro												

						Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Peserta Pelatihan/Sosialisasi Jumlah Usaha Mikro Yang di berikan bantuan peralatan Jumlah Usaha Mikro Yang Dikembangkan Menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro Yang Terdata	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.22 %	1108 Unit Usaha	900 orang 108 UMKM 24 UMKM 50 UMK	2.131.660.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1108 Unit Usaha	0,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								572.631.675,00				261.730.800,00
3	3 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								534.250.525,00				221.338.050,00
3	3 0	0 3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								300.879.000,00				0,00
3	3 0	0 3	2. 01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								300.879.000,00				0,00
3	3 0	0 3	2. 01	00 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
						Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik Persentase pasar yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dikelola	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70,37 % 70,37 Persen	19 Unit	19 Sarana Distribusi	300.879.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19 Unit	0,00
3	3 0	0 4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								174.518.450,00				158.464.050,00
3	3 0	0 4	2. 01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								99.107.575,00				103.203.200,00
3	3 0	0 4	2. 01	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat												

						Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	8 Kecamatan	4.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	6.496.200,00
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
						Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	8 Kecamatan	94.697.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	96.707.000,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								75.410.875,00					55.260.850,00
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan													

						Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Yang Disusun	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	64 Laporan	36 Lap	35.412.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	64 Laporan	37.423.075,00
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota												
						Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Yang Disusun	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	36 Lap	39.998.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	17.837.775,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								58.853.075,00				62.874.000,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								58.853.075,00				62.874.000,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang												
						Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Tera Yang Diawasi dan Ditera	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.66 %	1914 Unit	1914 Alat Tera	34.426.675,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1914 Unit	36.437.000,00
3	3	0	2.	00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal												

	0	6	01	02														
						Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Alat Tera Yang Diawasi dan Ditera	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,66 %	20 Orang	1914 Alat Tera	24.426.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	26.437.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								38.381.150,00					40.392.750,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								38.381.150,00					40.392.750,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								38.381.150,00					40.392.750,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
						Persentase IKM yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,67 Persen	8 Dokumen	2 Dokumen	38.381.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8 Dokumen	40.392.750,00
TOTAL													9.517.859.578,00					5.947.453.041,00

Majene, 29 Mei 2023
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian



H. BUSRI, SE., M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19641231 199309 1 005

